

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

DHIPTA ABDUL MUIZ

NPM 5117500163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX

DHIPTA ABDUL MUIZ


NPM 5117500163

Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh

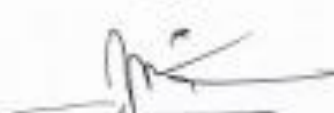
Tegal, Februari 2021

Penguji II

Penguji I


Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.

NIDN 0617075701


Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.

NIDN 0609086202

Pembimbing I

Pembimbing II


Soesi Idayanti, S.H., M.H.

NIDN 0627086403


Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H.

NIDN 0619058703

Mengetahui

Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 061506760

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX**

DHIPTA ABDUL MUIZ

NPM 5117500163

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Soesi Idayanti, S.H., M.H.

NIDN 0627086403



Tivas Vilka Widayastuti, S.H., M.H.

NIDN 0619058703

Mengetahui,

Dekan



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhipta Abdul Muiz

NPM : 5117500163

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 19 Oktober 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP INVESTOR DALAM
TRANSAKSI TRADING FOREX"**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuat oleh orang lain serta belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Februari 2021

Yang Menyatakan,



Dhipta Abdul Muiz

MOTTO

“ Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya . Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(Ath-Thalaq:2-3)

“ Barangsiapa yang bersabar atas kesulitan dan himpunan kehidupannya, maka Aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat.”

(HR. Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

1. Kedua Orang Tua Bapak Junedi dan Ibu Saidah.
2. Kakak Saya Dian Ulfatun Maulida, Dini Fitriana Qibtiyah dan Adik Saya Rifki Haikal.
3. Soesi Idayanti, S.H.,M.H. dan Tiyas Vika Widyastuti, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya.
4. Seluruh Keluarga Besar Saya.
5. Almameter tercinta Universitas Pancasakti Tegal.
6. Seluruh masyarakat yang nantinya akan menggunakan penulisan hukum ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat ALLAh Swt. *Alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.,M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Kanti Rahayu, S.H.,M.H., (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Toni Haryadi, S.H.,M.H., (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)

5. Imam Asmarudin, S.H.,M.H., (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
6. Muhammad Wildan, S.H.,M.H., (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
7. Soesi Idayanti, S.H.,M.H., (Dosen Pembimbing I) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Tiyas Vika Widyastuti, S.H.,M.H., (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata I. Mudah mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
10. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
11. Orang tua, serta saudara saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.

12.Kawan kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt.penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Februari 2021

Dhipta Abdul Muiz

ABSTRAK

Forex (Foreign exchange) dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan valuta asing merupakan perdagangan dua mata uang dua negara yang dilakukan oleh banyak pihak negara, institusi dan individu, baik untuk tujuan cadangan devisa, perdagangan internasional, juga untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga. Perdagangan valas antar pelaku pasar yang berlangsung selama 5 hari dalam seminggu dan dibuka selama 24 jam non stop. Perjanjian dalam transaksi trading forex berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut kurang efektif, mengingat masih banyak pialang pialang yang ilegal, yang tidak memiliki izin, dan perusahaan yang itikad buruk dengan maksud menipu investor. Karena undang undang Perdagangan Berjangka komoditi belum secara sepenuhnya untuk mengatur sistem *trading forex*.

Penelitian ini bertujuan : (1.)Untuk mendiskripsikan mekanisme perjanjian dalam transaksi trading forex. (2).Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi trading forex, agar kita ketahui kepastian hukumnya.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan pendekatan normatif, pengumpulan data melalui peraturan perundang undangan, buku buku, publikasi, jurnal jurnal dan hasil penelitian.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1.) Bagaimana mekanisme dalam perjanjian transaksi trading forex (2.) Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi trading forex.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Investor, Trading Forex*

ABSTRACT

Forex (Foreign exchange) in Indonesian, better known as foreign exchange, is trading in two currencies of two countries carried out by many countries, institutions and individuals, both for the purpose of foreign exchange reserves, international trade, as well as to take advantage of price differences. Forex trading between market players that lasts 5 days a week and is open 24 hours non-stop. Agreement in forex trading transactions based on Article 1338 of the Civil Code. This provision is not effective, considering that there are still many illegal, unlicensed brokers and companies with bad faith intentions of defrauding investors. Because the commodity futures trading law has not fully regulated the forex trading system.

This study aims: (1.) To describe the agreement mechanism in forex trading transactions. (2) To study legal protection for investors in forex trading transactions, so that we know the legal certainty.

This research is included in library research (Library Research), with a normative approach, collecting data through laws and regulations, books, publications, journals and research results.

As for the formulation of the problems in this thesis are :(1.) How is the mechanism in the forex trading transaction agreement (2) How is the legal protection for investors in forex trading transactions.

Based on the results of this study, it is hoped that it will become material for information and input for students, academics, practitioners, and all those in need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal.

Keywords: *Legal Protection, Investors, Forex Trading*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9

C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 17

A. Tinjauan Umum Trading Forex	17
B. Tinjauan Umum Perjanjian	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Unsur Unsur Perjanjian	25
3. Syarat Syarat sah Perjanjian.....	27
4. Asas Asas Perjanjian	34
5. Jenis Perjanjian.....	36
6. Hapusnya Perjanjian dan Berakhirnya Perikatan	38
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	39
1. Pengertian Perlindungan Hukum	39
2. Macam Macam Perlindungan Hukum.....	41
3. Lembaga Perlindungan Hukum.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Kepastiam Hukum	43
E. Tinjauan Umum Tentang Investor	48

1. Pengertian Investor.....	48
2. Macam Macam Perilaku Investor	49
3. Jenis Jenis Investor.....	51
 BAB III HASIL DAN PENELITIAN	53
A. Mekanisme dalam Perjanjian Trading Forex	53
B. Perlindungan Hukun bagi Investor dalam Transaksi Trading Forex .	74
 BAB IV PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran	b9
 DAFTAR PUSTAKA	91
 BIODATA PENULIS.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia zaman dahulu, manusia telah melakukan perdagangan dengan manusia lain di sekelilingnya. Untuk berbagai alasan dengan *barter*. Seiring perkembangan jaman dan peradaban sistem *barter* ini tidak digunakan lagi karena mempunyai kelemahan sehingga ditentukanlah sistem pembayaran baru yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang tak luput dari kelemahan juga dalam fungsinya untuk bertransaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda.¹

Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Masyarakat sudah memiliki pandangan hidup ke depan dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan yang tidak terduga di masa depan. Khususnya untuk kalangan masyarakat menengah atas sedang giat-giatnya menginvestasikan hartanya dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan berlimpah di masa depan. Selain itu investasi bagi sebagian orang merupakan sebuah gaya hidup baru. Mereka berlomba lomba mengikuti trend investasi yang gencar

¹<http://cariuang.purwochanger.com/sejarah-mata-uang-dan-pertukaran-valuta-asing.htm>, Diakses hari Senin, tanggal 21 September 2020

gencarnya dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan iming-iming return yang menguntungkan.²

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.³ Artinya, pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Pada buku III BW menganut sistem terbuka, karena para pihak yang terkait bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah disepakati.⁴ Perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan nasabah tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Perdata, tetapi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian mereka antara perusahaan berjangka dengan nasabah dapat saja terjadi⁵

Forex (Foreign exchange) dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan valuta asing merupakan perdagangan dua mata uang dua negara yang dilakukan oleh banyak pihak negara, institusi dan individu, baik untuk

² Dian Husna Fadla, Yunanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*, **Journal Ilmu Hukum**, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 207.

³ Firman F. Adonara, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm.3.

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika ,2014, hlm. 9.

⁵ <http://www.dudung.net/>. Di akses Hari Selasa, tanggal 24 November 2020.

tujuan cadangan devisa, perdagangan internasional, juga untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga. Nilai berubah dari waktu ke waktu, baik berubah menguat maupun melemah sebuah mata uang melemah apabila membutuhkan lebih banyak unit uang untuk membeli mata uang lain, dan sebaliknya sebuah mata uang dikatakan menguat apabila semakin kecil unit uang yang diperlukan untuk membeli mata uang lain. Berbagai kegiatan investasi di seluruh dunia yang dilakukan dalam skala internasional, seperti *foreign direct investment* di pasar modal dan pasar uang yang dilakukan oleh investor individu, *hedge funds*, dan *investment bankers*, selalu mengikutsertakan transaksi perdagangan *Forex*.⁶

Dalam transaksi perdagangan, ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Demikian pula di *forex*, terdapat perbedaan dimana pembeli dan penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah serah terima secara fisik juga. Semuanya dilakukan dalam bentuk perjanjian dan diperantarai oleh lembaga *arbitrase* yang biasa disebut sebagai *broker*.⁷ *Forex* tergolong dalam bursa berjangka, yaitu investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan kawan kawannya.

Pada mulanya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan *index* dan komoditi, dengan bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama *forex*. Karena sudah bukan lagi tergolong investasi sekuritas, maka *forex trading* pun memiliki lembaga regulasinya sendiri. Di Indonesia,

⁶ The Fei Ming, *Day Valuta Asing*, Jakarta: .Elex Media Komputindo, 2001, hlm. 1.

⁷<http://fxkeybizz.blogspot.com/2009/08/mekanisme-dan-legalitas-forex.html?m=1>, Diakses hari Senin, tanggal 15 September 2020.

regulator yang mengawasi kegiatan pialang ada dibawah wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta Kliring Berjangka Indonesia (KBI).⁸

Pasar *Forex* buka hampir selama 24 jam dalam sehari dan 5 (lima) hari dalam seminggu (hari Senin-Jumat). Pasar akan dimulai dari hari senin jam 04.00 WIB hingga hari sabtu jam 04.00 WIB.⁹ Pasar yang terbuka dan bisa diakses selama hampir 24 jam ini memberikan keuntungan untuk melakukan transaksi kapan pun tanpa terganggu oleh adanya jam-jam kerja bagi yang masih terikat dengan jam kerja perusahaan.¹⁰

Perdagangan *Forex* mengalami pertumbuhan pesat sejak mata uang negara diberi kebebasan untuk mengambang satu sama lain. Pada tahun 1977 *volume* perdagangan setiap harinya adalah US\$ 5 (lima) Miliar, dan *volume* transaksinya meningkat menjadi US\$ 600 Miliar pada tahun 1987 dan US\$ 1 (satu) Triliun pada bulan september 1992.¹¹ Secara Fundamental harga *Forex* bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran akan mata uang suatu negara oleh negara lain. Karena itu mata uang suatu negara dalam perdagangan dipasangkan dengan mata uang negara lainnya, seperti GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, Poundsterling Inggris (GBP) Dollar Amerika (USD), Euro (EUR) dan Yen Jepang (JPY) .¹² Tidak ada pasar

⁸ *Ibid*, hlm. 2.

⁹ Frento T.Suharto, *Investasi Secaea Benar Mengungkap Rahasia Forex*, Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

¹¹ The Fei Ming, *Day Trading Valuta Asing*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001, hlm.1.

¹² Muhammad Makky Dandytra, *Ilmu Trading untuk saham, forex, komoditi, dan index*, Jakarta: Evolitera, 2010, hlm. 23.

industri manapun yang bisa menyaingi nilai perputaran Transaksi *Forex Margin Trading* per harinya. Nilai total Transaksi *Forex Margin Trading* dunia berdasarkan data *Forex Survey* 2001 yang dilakukan oleh *bank For Internatinal Settlement (BIS)* berkembang secara spektakuler.

Pasar *forex* sebenarnya adalah pasar uang terbesar di dunia. Banyak sekali trader yang terlibat di dalamnya, perusahaan bertaraf internasional, bank-bank dunia maupun individu. Dalam pasar *forex* dikenal dengan istilah trader adalah sebutan untuk seseorang yang berprofesi sebagai pemain forex atau individu yang terlibat dalam transaksi jual beli aset keuangan apa pun, baik untuk dirinya sendiri atau atas nama orang atau lembaga lain. Banyaknya *trader* di pasar ini membuat perputaran uang menjadi sangat cepat. Perputaran uang yang begitu cepat, selain diakibatkan oleh banyaknya jumlah *trader*, juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti faktor ekonomi, politik dan sosial suatu negara. Akibatnya, harga menjadi sangat fluktuatif. Harga yang sangat fluktuatif merupakan resiko yang harus dihadapi para trader.¹³

Investasi *forex trading* merupakan investasi yang sangat menjanjikan dimana kita bisa memperoleh profit yang cukup lumayan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi dengan kehadiran *broker forex* online yaitu *marketiva* yang memberikan jasa *forex signal* di internet, semakin memudahkan setiap orang untuk mendulang profit di bisnis ini bahkan tanpa

¹³ Titin, *Analisis Pengambilan Keputusan dalam Transaksi Trading Forex di Exindo Regional Lamongan*, **Journal Ilmu Hukum**, Volume 17, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 692.

harus melewati upaya belajar yang terlalu lama dan tanpa harus memahami analisa teknikal/maupun fundamental yang memusingkan kepala.

Faktor Faktor yang melatar belakangi perkembangan pesat perdagangan *Transaksi Forex Margin Trading* ¹⁴:

1. Aktivitas global perusahaan multinasional.

Meningkatnyaa aktvitas dan kompetensi diantara perusahaan multinasional, seperti General Electric, Philips, dan IMB, telah memicu terjadinya pencarian sumber sumber dan peluang peluang investasi diseluruh dunia. Aktivitas ini turut mendorong terjadinya perdagangan *Forex Trading* antar negara. Peningkatan kebutuhan transaksi dan bedging. Seiring dengan meluasnya jangkauan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di manca negara, pertukaran *Forex* menjadi sama bagian penting dalam setiap aktivitas transaksi perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan mata uang asing tidak hanya untuk keperluan transaksi, namun juga untuk keperluan lindung nilai (*bedging*) terhadap fluktuasi nilai tukar.

2. Perkembangan sistem informasi dan teknologi komputer pada awal.

Perkembangan perdagangan *Forex* lebih banyak ditransaksikan melalui media, seperti telepon dan *faximile*. Namun, kedua media tersebut mempunyai beberapa kelemahan, seperti kecepatan yang rendah dan seiring terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Seiring dengan kemajuan sistem informasi dan teknologi dewasa ini,

¹⁴. The Fei Ming, *loc.cit.* hlm. 3.

khususnya dalam pengembangan sistem komputer, digunakanlah sistem online komputer dan penyedia jasa informasi (*financial service*), seperti Reuters dan Bloomberg. Sistem ini berkepentingan dalam transaksi perdagangan *Forex Trading* dalam waktu yang singkat dan untuk melakukan Transaksi *Forex Trading*. Perkembangan peranti keras (*Hardware*) memungkinkan. Suatu *financial services* seperti *Reuters*, menyimpan dan menyebarkan berbagai informasi, berita, dan quote nilaitukar dari berbagai bank,keseluruh dunia. Perkembangan peranti lunak (*Software*), seperti *Meta Stock* dan *Reuters Technical Analisis* terhadap berbagai bentuk grafik.

3. Legenda sukses para Investor dunia.

Legenda dari investor investor besar yang telah sukses meraih jutaan bahkan ratusan juta dolar AS dalam transaksi *Forex Trading*, seperti George Soros dan Victor niederhoffer, turut memotivasi para investor dan trader melakukan transksi dalam transaksi *trading*. George Soros, mengumpulkan keuntungan hingga ratusan juta dolar AS dan menjadi salah satu investor yang paling disegani dipasar *forex* dunia. Motif untuk ini berguna untuk menghubungkan berbagai pihak yang melalui perusahaan investasinya *Quantum Fund*, berhasil memperoleh laba dalam jumlah besar inilah yang banyak memacu berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam *transaksi Trading Forex* sehingga pada akhirnya turut meningkatkan *volume transaksi Trading Forex*.

Permintaan dan penawaran yang terjadi dalam *forex* salah satunya disebabkan kegiatan perdagangan antar negara, yang biasa disebut *export import*. Semakin banyak suatu negara melakukan *export* barang ke negara lain, maka negara negara lain tersebut akan banyak membutuhkan mata uang negara *exportir* tersebut. Oleh karena itu, Jika *trade balance* suatu negara positif (yang berarti suatu negara lebih banyak *export* dari pada *Import*) maka mata uang negara tersebut menguat¹⁵.

Forex termasuk dalam golongan perdagangan berjangka, dan perdagangan *forex* diatur dalam termasuk dalam golongan perdagangan Berjangka, dan perdagangan *forex* diatur dalam Undang undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya bab VII. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai hal hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme, perdagangan, pembukuan / pelaporan, dan penerapan hukum.

Oleh karena itu perkembangan yang terjadi saat ini dimana kepercayaan masyarakat kepada perusahaan pialang masih sangat rendah dalam melakukan investasi, yang terbukti dari banyak orang yang berminat investasi dibidang ini kemudian menjadi lahan subur timbulnya jenis penipuan dengan menyamar sebagai pialang-pialang *forex*.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁶ Dianata Eka Putra, *Berburu uang di pasar modal* , Jakarta: Penerbit Effhar & Dahara Prize, 2002, hlm. 1.

Permasalahan yang sering muncul adalah sejauh mana ruang lingkup perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *trading forex*. Oleh karena itu penulis tertarik memilih judul kedalam skripsi yang berjudul :
“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada atas pada latar belakang permasalahan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme dalam perjanjian transaksi *trading forex*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *trading forex*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan penjelasan dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan mekanisme perjanjian dalam transaksi *trading forex*.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading forex*, agar kita ketahui kepastian hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bahan pertimbangan bagi calon investor dalam melakukan transaksi trading forex.
- b. Dapat mengetahui peraturan hukum apa yang dipakai perusahaan pialang untuk tercapainya perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi melalui trading forex di Indonesia saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pihak pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dasar perlindungan hukum dalam transaksi Trading Forex di Indonesia.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat berupa pengetahuan melalui tulisan tentang perkembangan transaksi dan kemajuan pasar berjangka di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya:

- 1) Nailly Surroya dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading pada bursa Berjangka oleh Perusahaan Pialang berjangka”¹⁷. Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pengawasan dalam transaksi trading forex pada perusahaan pialang berjangka dan pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara perusahaan pialang berjangka dengan investor dalam transaksi trading forex. Hal ini serupa dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, yang membedakan hanyalah dalam fokus penelitiannya dalam pengaturan dan pengawasan, beda halnya dengan peneliti mengkaji perjanjian investor dalam transaksi trading forex.
- 2) Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Foreign Exchange Trading Pada Perusahaan Pialang Berjangka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”¹⁸. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dimana dua-duanya meneliti perihal perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi trading forex. Perbedaannya hanya dalam kajian yang diteliti Upaya yang dapat digunakan untuk memulihkan hak investor, beda halnya dengan penelitian penulis yang mengkaji perjanjian investor.

¹⁷Nailly Surroya, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka oleh Perusahaan Pialang Berjangka”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, t.d.

¹⁸Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Foreign Exchange Trading pada Perusahaan Pialang Berjangka ditinjau dari Undang Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, Skripsi Sarjana Hukum, Jember: Fakultas Hukum Jember, 2013, t.d.

- 3) Indah Kusuma Wardhani,¹⁹ “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Forex Trading Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi(Studi Kasus di PT.Finex Berjangka)”. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam jurnal tersebut hanya meneliti pelaksanaan trading forex. Akan tetapi jurnal tersebut memiliki persamaan dalam hal sama sama meneliti perihal perlindungan investor dalam transaksi trading forex.

Berdasarkan tiga penelitian di atas, yang membedakan antara skripsi peneliti dengan penelitian tersebut adalah obyek dan subyeknya. Pada skripsi pertama membahas tentang pengaturan dan pengawasan dalam transaksi *trading forex* pada perusahaan pialang berjangka dan pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara perusahaan berjangka dengan investor dalam transaksi *trading forex*. Kemudian skripsi yang kedua membahas tentang upaya yang dapat memulihkan hak investor berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam jurnal diatas membahas tentang studi kasus PT. Finex berkaitan dengan pelaksanaan trading forex. Penelitian peneliti membahas terkait mekanisme perjanjian serta perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading forex*. Selain itu, investor atau nasabah sehingga dapat mengetahui perlindungan hukum saat transaksi *trading forex*.

¹⁹ Indah Kusuma Wardhani, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Forex Trading menurut Undang Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”(Studi kasus di PT. Finex Berjangka) **Jurnal Ilmu Hukum**, Volume III, Nomor 1, Tahun 2016. hlm 445.

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian *library research* merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara menelaah buku buku, literatur literatur, catatan catatan, dan laporan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dipecahkan.²⁰

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan konsep yang memandang hukum dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini mengkaji hukum tertulis sesuai hukum yang berlaku.²¹

c) Sumber Data Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi dalam bentuk laporan resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang undangan.²²

²⁰ Nazir,M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 27.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University, 2019, hlm 3

²² Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 106.

Berdasarkan sumbernya, bahan hukum dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangan yang terkait dengan objek penelitian²³ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer diperoleh dari penulis dari beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, meliputi :

- a. Pancasila
- b. Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/*Burgelijk Wetboek*)
- d. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- e. Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum.

²³ *Ibid*

3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum yang berasal dari Kamus Hukum, Ensiklopedia.²⁴

d) Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian yang menggunakan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*):
2. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku buku, dokumen resmi, publikasi, jurnal jurnal, dan hasil penelitian.²⁵
3. Teknik pengumpulan data secara daring (online) yaitu dengan mengutip sumber dan *webstite* yang membahas mengenai perlindungan hukum investor dan *trading forex*

e) Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan serta bahan atau buku buku bacaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading forex*, yang kemudian dipadukan dengan pendapat dan dicari pemecahannya, lalu ditarik kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hlm.107.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 bagian bab tahapan penulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Tinjauan Konseptual, bab ini berisi : Penjelasan secara umum mengenai tinjauan umum tentang trading forex, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang konsep kepastian hukum, tinjauan umum tentang investor.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi : Uraian dan penjelasan serta pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang berkaitan dengan mekanisme transaksi *trading forex* serta perlindungan hukum transaksi *trading forex*

Bab IV Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX

A. Tinjauan Umum tentang Trading Forex

Forex adalah kependekan dari *Foreign Exchange* yang berarti mata uang asing yang sering juga disebut sebagai Valuta asing.²⁶ Pasar valuta asing atau *forex market* adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop. Pergerakan *forex* berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00 sampai dengan 14.00 WIB, terus ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong, yang berlangsung pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB, ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang berlangsung pukul 13.00 sampai dengan 22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 sampai dengan 10.30 WIB.²⁷

Pusat perdagangan *forex* utama di dunia adalah London, New York, Tokyo, dan Singapura dimana bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan Forex terjadi sepanjang hari apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, kecuali di akhir

²⁶ Joko Salim, *Tanya Jawab Forex*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, hlm 01.

²⁷ Hariyani, Iswi, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. hlm 120.

pekan.²⁸ *Forex* dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komoditi. Kegiatan *forex* dapat digolongkan sebagai pasar uang, misalnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai dilakukan oleh pedagang valas. Kegiatan transaksi *forex* yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).²⁹

Pada dasarnya perdagangan forex ada karena adanya kegiatan ekspor impor negara negara didunia. Karena itu mata uang tiap tiap negara berbeda beda maka muncullah suatu sistem pertukaran mata uang untuk memudahkan melakukan transaksi.³⁰ Perdagangan *forex* mulai berkembang pesat pada tahun 1973, yaitu sejak terjadinya perubahan sistem moneter internasional. Perubahan tersebut diawali kepada presiden Nixon `mengumumkan perubahan sistem nilai tukar untuk USD yang *semula Fixed exchange rate system floating exchange rate system* pada tanggal 15 agustus 1971. Perubahan ini ditegaskan dalam suatu konferensi di Washington yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 18 desember 1971, yang dikenal dengan *Smithshonian Conference*.³¹

Trading Forex dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan valas antar negara maupun di dalam suatu negara dengan menggunakan patokan nilai kurs jual beli mata uang asing sejumlah negrara yang

²⁸ *Ibid*, hlm 121.

²⁹ *Ibid*, hlm. 122.

³⁰ *Ibid* hlm 123

³¹ Lucius M. Sitanggung dan Yulika Indrawati, *Psycho On Trading*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007, hlm 14.

tergolong kuat (*convertible currencies*) dan mata uang lemah (*soft currencies*) berdasarkan kontrak *spot*(tunai), kontrak *forward* (kontrak serah/kontrak tunggak), kontrak *futures* (kontrak berjangka), kontrak opsi (opsi *call*/ beli atau opsi *put*/jual), dan kontrak *swap* (kontrak barter).³²

Dalam perdagangan valuta asing yang diperdagangkan adalah uang, ada beberapa mata uang yang menjadi mata uang penggerak perekonomian dunia, yaitu³³ :

Tabel 1. Mata Uang Negara di Dunia dalam Forex

	SIMBOL	NEGARA	MATA UANG
i	USD	United States	Dollar
	EUR	Euro members	Euro
	JPY	Japan	Yen
	GBP	Great Britanian	Pound
	CHF	Switzerland	Franc
f	CAD	Canada	Dollar
	AUD	Australia	Dollar

forex market orang yang dapat membeli atau menjual mata uang yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan, transaksinya juga dapat dilakukan dua arah untuk mengambil keuntungan. Seseorang dapat membeli dahulu (*open buy*), lalu ditutup dengan menjual (*sell*) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan terlebih dahulu, lalu ditutup dengan membeli.³⁴

Dalam *forex market* terdapat beberapa pelaku di dalamnya yaitu:

³² *Ibid*, hlm 122.

³³ Sawidji Widodoatmojo, *Forex Online Trading*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012. hlm. 17.

³⁴ Hariyani, Iswi, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. hlm 120.

a) Pedagang (*Dealer*)

Dealer disebut juga pembentuk pasar (*market maker*) yang berfungsi membuat forex market bergairah. *Dealer* umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai *dealer* adalah bank, meskipun ada beberapa yang nonbank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli forex. Istilah pedagang (*dealer*) dalam hal ini berbeda dengan pedagang valas (*money changer*) yang hanya berfungsi menjual dan membeli mata uang secara fisik dan tunai.

b) Perusahaan atau Perorangan

Perusahaan dan individu dapat melakukan transaksi Forex. Forex Market juga dapat dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor domestik, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain-lain.

c) Spekulasi dan Arbitrator

Spekulasi dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan market yang akan meramaikan transaksi. Para spekulasi mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga forex (*capital gain*). Sedangkan arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai market.

d) Bank Sentral

Fungsi Bank Sentral adalah sebagai stabilitator nilai tukar. Bank Sentral me-manfaatkan *forex market* untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan mata uang asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang sehingga berdampak positif bagi perekonomian fiegara yang bersangkutan.

e) Pialang Berjangka (*Broker*)

Pialang berjangka (*broker*) bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap ma- ta uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, pialang berjangka (*broker*) harus mempunyai akses langsung dengan para dealer dan bank yang melakukan perdagangan Forex di seluruh dunia.³⁵

Dalam *forex market*, ada beberapa jenis pialang berjangka, yaitu pialang berjangka konvensional, pialang berjangka *non dealing disk*, pialang berjangka *dealing desk*, dan pialang berjangka hybrid.³⁶

B. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbintesis*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang di tafsirkan sebagai *wilsovereenmning* (persesuaian kehendak/kata sepakat).

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau

³⁵ Indah Kusuma Wardhani, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Forex Trading menurut Undang Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi"(Studi kasus di PT. Finex Berjangka) **Jurnal Ilmu Hukum**, Volume III, Nomor 1, Tahun 2016. hlm 445

³⁶ *Ibid*, hlm 446.

lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatnya dirinya.³⁷ Dalam hukum positif Indonesia sendiri definisi perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁸ Menurut Abdul Kadir Muhammad, S.H. dalam bukunya yang berjudul hukum perikatan, antara lain disebutkan bahwa didalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:

a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Ada persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan bargaining atau tawar-menawar diantara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualisme dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan dan kekhakiman.

³⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 18.45 WIB.

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009, hlm. 84.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu, para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitupun sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta maka akta tersebut bisa dibuat secara *authentic* maupun *underhands*. akta yang dibuat secara *authentic* adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata ayat satunya menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁹

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan ini memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak wajib yang berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur) masing-masing pihaknya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau badan hukum.⁴⁰

Perjanjian yang sah dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi syarat perjanjian telah memenuhi syarat perjanjian maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dapat mengikat dan wajib dipenuhi oleh kedua pihak atau lebih karena telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini jelas

³⁹ *Ibid*, hlm.

⁴⁰ Kartini Mujadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 92.

tertuang dalam pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya*”.

2. Unsur-unsur perjanjian

Dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan, seperti apa yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Unsur adalah unsur bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat di bagi-bagi lagi, sehingga di dalam suatu perjanjian juga terdapat unsur unsur yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:⁴¹

a. Accidentalialia

Unsur ini adalah unsur perjanjian bagian tambahan. Tambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan. Misalnya, perjanjian bukan hanya ada kamar tidur dan ruang keluarga, melainkan ditambahkan harus ada gazebo dan hal hal lain yang disepakati oleh para pihak⁴²

b. Naturalia

Unsur ini adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang tersebut, sehingga unsur *naturalia* inimerupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.

⁴¹ Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 31-32.

⁴² *Ibid*, hlm 32.

Dalam jual beli, unsur *naturalianya* terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi⁴³.

c. *Essentialia*

Unsur *essentialia* merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur essential ini maka tidak ada perjanjian. Dalam perjanjian jual beli, bagian pokoknya harus ada harga barang yang di perjual belikan⁴⁴.

Unsur-unsur perjanjian berdasarkan beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut di atas jika disimpulkan maka perjanjian terdiri dari :⁴⁵

- (a) Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.
- (b) Ada persetujuan antara pihak-pihak. Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian, maka timbullah persetujuan.
- (c) Ada tujuan yang akan dicapai. Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.
- (d) Ada prestasi yang dilaksanakan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian,

⁴³ *Ibid*, hlm 31.

⁴⁴ *bid*, hlm 31.

⁴⁵ Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja, *loc.cit* hlm 79

misalnya pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

- (e) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan. Perlunya bentuk tertentu, karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu, suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.
- (f) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Atas dasar syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

3. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Tiap-tiap perjanjian yang mempunyai dasar pembentukan. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah), keempat unsur tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: adanya kesepakatan di antara para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁶

- (1) Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat

⁴⁶ Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. 2, 2001, hlm . 34.

objektif tersebut adalah: (a) Perihal tertentu, dan (b) Sesuatu yang halal.

- (2) Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah: (a) Kesepakatan kehendak, dan (b) Kecakapan berbuat.

Walaupun demikian, terkait dengan syarat subjektif kecakapan berbuat diatur juga dalam Pasal 446 KUH Perdata, yang menentukan bahwa: “pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.” Dengan demikian tidak semua ketidakcakapan berbuat berakibat dapat dibatalkannya perjanjian, tapi juga dapat batal demi hukum.

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:⁴⁷

a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran

⁴⁷ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 14.

tersebut. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pertanyaannya adalah “Kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?” Ada empat teori yang menjawab hal ini, yaitu :⁴⁸

- (1) Teori Ucapan (*uitingstheorie*). Menurut teori ini, Kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan pulpen untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- (2) Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*). Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan teori ini juga sangat teoritis, menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- (3) Teori Pengetahuan (*venemingstheorie*) Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

⁴⁸ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 87.

(4) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*). Menurut teori ini, toesteming terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Dalam hukum positif Belanda, juga diikuti yurisprudensi, ataupun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) dengan sedikit koreksi dari *ontvangstheorie* (teori penerimaan). Maksudnya, penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak, sebab lalu lintas hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang kaku, sehingga *vernemingstheorie* yang dianut. Karena jika harus menunggu sampai mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lawan (*ontvangstheorie*), diperlukan waktu yang lama.⁴⁹

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:⁵⁰ (a). Dengan cara tertulis; (b). Dengan cara lisan; (c). Dengan simbol-simbol tertentu; bahkan (d) Dengan berdiam diri.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan

⁴⁹ Ibid, hlm 163

⁵⁰ Ibid, Ahmadi Miru, hlm 15.

pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Cacat kehendak dalam hal ini dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya: (1) Ancaman; (2) Penipuan; dan (3) Penyalahgunaan keadaan.

Secara sederhana ketiga hal yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Ancaman (*bedreiging*) terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga.⁵¹

Penipuan (*bedrog*) terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.

b. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21

⁵¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 98

tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros. Namun demikian, dalam berbagai peraturan lain juga diatur bahwa seseorang dianggap cakap oleh hukum apabila ia paling rendah telah berumur 18 atau ia telah kawin, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris,⁵² Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak,⁵³ dan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan.⁵⁴

c. Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.⁵⁵

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Untuk menentukan hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian seperti

⁵² Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵³ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁵ Ahmadi Miru, *Op. Cit.* Hlm. 30.

”berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga”.

d. Sebab yang Halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.⁵⁶ Jadi, maknanya adalah *causa finalis* bukan *causa efisien*. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang undang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak maupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

4. Asas-Asas Perjanjian

KUHPerdata mengatur mengenai asas-asas umum dari suatu perjanjian. Asas-asas ini merupakan suatu pedoman dan Batasan

⁵⁶ Subekti, *Op. Cit.* hlm. 19.

dalam mengatur dan membentuk perjanjian⁵⁷ Asas perjanjian ini antara lain:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Maksud dalam asas ini ialah perjanjian lahir dan telah mengikat segera setelah para pihak mencapai kesepakatan, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu. Dengan asas konsensualisme perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dijumpai dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama dengan suatu

⁵⁷ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 24.

undang-undang yang diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.⁵⁸

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, karena pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian. Asas ini menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵⁹

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik artinya bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat dan tanpa akal-akalan, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri juga kepentingan orang lain. Asas ini memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi

⁵⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 27. t.d

⁵⁹ R. Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 8.

pelaksanaan suatu perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan.⁶⁰

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.⁶¹

5. Jenis-Jenis Perjanjian

a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Setiap perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau banyak. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja, misalnya hibah.⁶² Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak, misalnya jual beli, sewa menyewa.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

⁶⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm.94.

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 301.

⁶² Herlien Boediono, “*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*,” Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 54-55.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian, dimana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain secara cuma-cuma. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain. Antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan hukum satu dengan yang lain. Misalnya jual beli, sewa menyewa.⁶³

c. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat juga dibutuhkan formalitas tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya pembebanan jaminan fidusia.⁶⁴

d. Perjanjian bernama, tidak bernama dan campuran Perjanjian Bernama

Perjanjian, dimana oleh undang-undang telah diatur secara khusus. Perjanjian bernama diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata⁶⁵ Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang tetapi terdapat

⁶³ Marbun, B.N. “*Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*”, Jakarta: Puspa Swara, 2009

⁶⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. Hlm

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 301,

dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama, perjanjian pengelolaan. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian. Misalnya perjanjian *leasing*, *franchising* dan *factoring*. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua lebih perjanjian bersama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju dan membersihkan kamar).

6. Hapusnya Perjanjian dan Berakhirnya Perikatan

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata hanya hapusnya perikatan perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum.⁶⁶ KUHPdata mengatur mengenai Hapusnya Perikatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1381.

Perikatan hapus:

- a. karena pembayaran;

⁶⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm 87.

- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaruan utang;
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. karena percampuran utang;
- f. karena pembebasan utang;
- g. karena musnahnya barang yang terutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini dan
- j. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam satu bab sendiri.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Martha Novisditya, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi

⁶⁷ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, **TESIS**. hlm. 3.

untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.⁶⁸

Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan pada Pancasila adalah:

a. Prinsip pengakuan akan harkat dan martabat manusia

Bersumber pada Pancasila Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar Negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama. Pengaturan hidup bersama didasarkan atas musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan tujuan dari hidup bersama diarahkan kepada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

⁶⁸ Martha Noviditya, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan" , **Skripsi**, Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm.108.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.⁶⁹

2. **Macam – Macam Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ini, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm 258-264.

hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷⁰

3. Lembaga Yang Memberikan Perlindungan Hukum

Indonesia yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi ialah permintaan banding terhadap suatu tindakan tersebut kepada pejabat pemerintah yang lebih tinggi.

⁷⁰ *Ibid* Hlm 2-3

- c. Badan-badan khusus, antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara.⁷¹

D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi⁷².

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

⁷¹ *Ibid* Hlm 13

⁷² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

melakukan tindakan terhadap individu Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁷³.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.⁷⁴

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁷⁴ *Ibid* Dosminikus Rato, Hlm.59

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal – hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis.⁷⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁷⁶

⁷⁵ Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 140-141

⁷⁶ Cst Kansil, Christine, et.al, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata, 2009, hlm. 385.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁷⁸

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional

⁷⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

⁷⁸ *Ibid*, hlm 95

seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUH Perdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut

wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

E. Tinjauan Umum Tentang Investor

1. Pengertian Investor

Pada prinsipnya, dalam setiap kegiatan usaha akan melibatkan dua instrumen yang saling mendukung, mereka adalah pengelola usaha atau perusahaan dan penyedia dana untuk kebutuhan perusahaan. Penyedia dana sering disebut sebagai investor, mereka merupakan pihak yang menempatkan kelebihan dananya (*surplus of fund*) untuk kegiatan investasi di sektor usaha yang halal dan produktif. Investasi syari'ah adalah menanamkan atau menempatkan modal pada kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan syara' dan diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang halal di masa mendatang.⁷⁹ Lebih spesifik lagi bahwa investor merupakan perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya.⁸⁰

2. Macam macam perilaku investor

Gambaran macam-macam perilaku investor di pasar modal yang telah dirumuskan Bailard, Biehl & Kaiser sebagaimana dikutip Hartono, klasifikasi investor yang telah dilakukan lembaga investasi di California

⁷⁹ Burhanuddin S., Loc. Cit. hlm. 41

⁸⁰ Hendy M. Fakhruddin, Loc. Cit. hlm. 98

mengategorikan 5 (lima) macam perilaku investor di pasar modal, kemudian orang mengenal dengan sebutan the Five-Way Model yaitu:⁸¹

- a. Petualang (*Adventurers*). Investor yang tergolong pada poin ini umumnya tidak memperdulikan risiko, bahkan cenderung untuk menyukai risiko (*Risk Takers*). Mereka cenderung untuk tidak memperdulikan nasihat para financial advisors karena berbeda pandangan tentang risiko.
- b. *Celebrities*, perilaku Kelompok ini selalu ingin tampil, menonjol, dan menjadi pusat perhatian. Mereka seringkali tidak terlalu peduli pada perhitungan untung-rugi investasi, asalkan keputusan mereka untuk membeli atau menjual surat berharga dilihat dan didengar oleh orang banyak. Dan mereka tergolong dalam kecenderungan Risk Takers.
- c. Perilaku individualists. Perilaku ini terdiri dari orang-orang yang cenderung untuk bekerja sendiri dan tidak peduli pada keputusan investasi orang lain (jadi merupakan kebalikan dari perilaku yang cenderung untuk mengikuti arus). Mereka cenderung menghindari risiko yang tinggi dan tidak keberatan untuk menghadapi risiko yang moderat.
- d. *Guardians*. Pola perilaku investor yang beranggotakan investor “matang”, mereka lebih berpengalaman serta berpengetahuan relatif

⁸¹ Hartono, Pertimbangan Return Dan Risiko Dalam Keputusan Investasi, Surakarta, 2009, makalah disampaikan saat pengukuhan Prof. Dr. H. Hartono, M.S sebagai Guru Besar Universitas Sebelas Maret Surakarta 5 Maret 2009. makalah dapat di unduh pada web. <http://pustaka.uns.ac.id/?menu=news&option=detail&nid=127>.

luas. Cenderung mereka sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Ketika mereka didampingi oleh financial advisor, maka pendampingnya itu akan dijadikan teman berdiskusi. Jika ternyata terjadi "kesalahan" keputusan investasi, kelompok ini cenderung tidak mengkambinghitamkan orang lain, karena merasa telah terlibat langsung dalam proses pemilihan investasi. Mereka yang ada di dalam perilaku kelompok ini pada umumnya lebih bersifat Risk Averse.

- e. Terakhir adalah perilaku kelompok yang tidak dapat secara tegas dimasukkan ke salah satu dari empat kelompok di muka. The Five-Way Model menyebut mereka sebagai kelompok Straight Arrows, yaitu mereka yang tergabung dalam kelompok ini kadang-kadang bersifat sangat Risk Averse, dan terkadang sebaliknya. Suatu ketika mereka mengambil keputusan atas dasar kepercayaan pada kemampuan diri sendiri seperti halnya kelompok individualists, tetapi pada waktu lain lebih menampakkan Sifat *Follow The Crowd*.

3. Jenis-jenis Investor

Berdasarkan kemampuan dalam menerima informasi:

- a. *Sophisticated* investor adalah investor yang cangguh dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang ia terima.

- b. *Naïve investor* adalah investor yang kurang mampu dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang ia terima.⁸²

Berdasarkan risiko yang akan diterima :

- a. Investor Konservatif Yang *Risk Averse* (Menjauhi Risiko)

Investor yang satu ini memiliki kecenderungan untuk melakukan investasi dengan keuntungan yang layak dan sesuai. Artinya investor ini adalah investor yang suka dengan investasi yang relatif lebih aman atau investasi yang hasilnya sudah diketahui sebelumnya. Investor jenis ini juga lebih mengutamakan tingkat keamanannya dibandingkan keuntungan yang dihasilkan.

- b. Investor Moderat yang *Risk Neutral* (Netral Terhadap Risiko)

Tipe investor yang satu ini sebenarnya cukup memahami terhadap investasi yang memiliki risiko, tetapi beberapa dari mereka tidak mau mengambil risiko yang tingkat imbal hasilnya yang lebih tinggi. Biasanya investor yang satu ini selalu mencari proporsi yang seimbang antara risiko yang mungkin terjadi dengan pendapatan yang diterima. Mereka yang memiliki preferensi ini juga biasanya lebih berhati-hati dalam menentukan jenis investasinya.

- c. Investor Agresif yang *Risk Seeker* (Toleran Terhadap Risiko)

Untuk investor yang satu ini ini biasanya lebih mengerti prinsip high risk high gain. Para Risk Seeker ini juga cenderung untuk

⁸² Hartono Jogianto, “ *Teori Portofolio dan Analisa Investasi*” Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, Tahun 2015. hlm 10.

mencari imbal hasil yang tinggi, maka dari itu mereka lebih berani mengambil risiko dalam investasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme dalam perjanjian transaksi *trading forex*

Perdagangan *trading forex* merupakan salah satu alternatif kegiatan usaha yang terus berkembang pesat di Indonesia karena dapat memberikan kemungkinan keuntungan yang tidak terbatas dan jauh lebih besar dari dana yang disimpan (*margin*). Dengan potensi keuntungan yang besar, devisa menjadi pilihan nasabah untuk berinvestasi. Namun nyatanya, karena pialang berjangka melanggar ketentuan perundang-undangan atau pialang berjangka gagal bayar, banyak nasabah yang masih mengalami kerugian dalam transaksi valas. Misalnya, seorang pialang berjangka melakukan kegiatan usahanya tanpa mendapat izin usaha Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Ini biasanya dilakukan oleh *broker* dari luar negeri.

Mereka menjanjikan keuntungan yang besar sehingga nasabah tergiur untuk menginvestasikan uangnya dalam *forex trading*. Setelah uang nasabah yang terjaring cukup banyak, biasanya portal trading tidak bisa diakses, artinya uang nasabah juga hilang karena tidak bisa terlacak. Selain itu, pialang berjangka juga dapat melakukan kecurangan dengan cara

memanipulasi transaksi dalam forex trading. Akibatnya nasabah kekalahan dan menderita kerugian hingga puluhan miliar rupiah.⁸³

Sebagai alat baru dalam komunitas investasi, perdagangan berjangka diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang besar.⁸⁴ Namun demikian apapun bentuk investasi dengan sendirinya tidak akan terlepas dari resiko. Hal yang sama juga berlaku untuk investasi di bursa berjangka.

Perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan nasabah tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan Berjangka dengan nasabah dapat saja terjadi.⁸⁵

Perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk pelaksanaan investasi dari investor di Bursa Berjangka. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata⁸⁶ yang berbunyi : *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

⁸³ Indah Kusuma Wardhani, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Forex Trading menurut Undang Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi"(Studi kasus di PT. Finex Berjangka) **Jurnal Ilmu Hukum**, Volume III, Nomor 1, Tahun 2016. hlm 445.

⁸⁴ Artikel, Awas Hati-Hati Dengan Pialang Jalang, Op.cit hal 14

⁸⁵ [http ://www.dudung.net/](http://www.dudung.net/), diakses pada hari selasa, tanggal 15 Desember 2020

⁸⁶ R. Subekti, R Tjirosudibio, Op.cit. hal 342

Perjanjian antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah / investor dalam transaksi forex margin trading harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa :

Syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendapat;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya tidak mempermasalahkan media yang digunakan dalam transaksi. Dengan kata lain Pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Demikian pula asal kebebasan berkontrak yang dianut KUH Perdata, para pihak dapat dengan bebas menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan Undang-undang bagi yang membuatnya.

Syarat 1 dan 2 disebut kondisi subyektif karena terkait dengan subjek kesepakatan, dan dua kondisi terakhir disebut kondisi obyektif karena terkait dengan objek kesepakatan. Jika salah satu kondisi subyektif tidak terpenuhi, kesepakatan dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak. Pada saat yang sama, jika salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka

kesepakatan menjadi batal, artinya kesepakatan tidak pernah tercapai sejak awal, dan kesepakatan tidak pernah tercapai.⁸⁷

Dari perjanjian sebagaimana disebut diatas, Perjanjian antara Perusahaan Pialang Berjangka dengan Nasabah / Investor dalam transaksi *trading forex* adalah dibuat dalam formulir-formulir yang telah dibakukan secara rinci dan cermat. Dalam perjanjian transaksi tersebut, isinya direncanakan terlebih dahulu oleh para pihak perusahaan pialang berjangka. Sehingga nasabah/investor tinggal menyetujuinya saja apabila nasabah bersedia menerima aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan serta yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan pialang berjangka. Akibatnya perjanjian tersebut tidak memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membicarakan lebih lanjut klausula yang diajukan oleh Pialang Berjangka. Syarat-syarat itu berlaku bagi siapapun juga yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu atas dasar prinsip *take it or leave it*, tanpa ada negosiasi sebelumnya. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku.⁸⁸

Pengertian klausula standar tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999, yang merupakan dokumen mengikat dan/atau kesepakatan yang dituangkan dalam setiap aturan, ketentuan, dan secara sepihak ditentukan oleh kondisi pelaku usaha. Puas dengan konsumen. Standar dalam perjanjian adalah syarat-syaratnya bukan bentuk perjanjian. Saat ini posisi klien terlalu lemah

⁸⁷ [http ://www.dudung.net/](http://www.dudung.net/),. Op. Cit.

⁸⁸ Ibid

sehingga dia hanya menerima peraturan dan ketentuan dari perusahaan pialang berjangka.

Dengan adanya Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka perjanjian dengan klausula baku telah dilarang. Larangan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian diatur dalam Pasal 18 ayat (1), berupa :

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kemudian dalam ayat-ayatnya disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat, atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Lalu dalam ayat (3) dinyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.

Hubungan kontraktual antara Pialang Berjangka dengan nasabah suatu bentuk kontrak campuran yang menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberi kuasa (*lastgeving*), sebagaimana diatur dalam perjanjian dalam transaksi *trading forex* antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah / investor.

Mekanisme perjanjian meliputi beberapa tahapan yang berupa perjanjian yang dituangkan dalam formulir-formulir yang wajib diisi oleh calon investor.

Formulir-formulir yang wajib diisi oleh calon investor adalah sebagai berikut :

1. Formulir Pembukaan Rekening
 - a. Perorangan

- (1) Nama lengkap Pemegang Rekening;
- (2) Kewarganegaraan;
- (3) Alamat/Tempat Tinggal (sesuai dengan KTP/SIM/Passport);
- (4) Pekerjaan;
- (5) Penghasilan Tahunan : Kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau jumlah lain (sebutkan);
- (6) Jumlah kekayaan : Kurang dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) atau jumlah lain atau jumlah lain (sebutkan);
- (7) Jaminan : Dalam bentuk uang (disebutkan besarnya), yang ditransfer langsung kepada rekening Perusahaan Sekuritas; Dalam bentuk efek (disebutkan banyaknya);
- (8) Sumber Dana;
- (9) Tujuan Penggunaan Dana;

b. Perusahaan/Badan Hukum

- (1) Nama Perusahaan/Badan Hukum;
- (2) Alamat Perusahaan/Badan Hukum;
- (3) Nilai Kekayaan : Kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau jumlah lain (sebutkan);
- (4) Keuntungan Bersih Tahunan: Kurang dari Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) atau jumlah lain (sebutkan);
- (5) Jaminan : Dalam bentuk uang (disebutkan besarnya), yang ditransfer langsung kepada rekening Perusahaan Sekuritas; Dalam bentuk efek (disebutkan banyaknya);
- (6) Pihak yang berwenang mewakili Perusahaan/Badan Hukum (Penerima Kuasa);

Dokumen Pendukung :

- 1) Akta pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan/Badan Hukum;
- 2) SIUP/TDP;
- 3) NPWP;
- 4) Laporan Keuangan/Diskripsi Kegiatan Usaha;
- 5) KTP/SIM/Passport Pihak yang berwenang mewakili Perusahaan/Badan Hukum (Penerima Kuasa);
- 6) Struktur Manajemen Perusahaan/Badan Hukum;
- 7) Surat Kuasa.
- 8) Sumber Dana
- 9) Tujuan Penggunaan Dana

“Dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan Sekuritas untuk membuka Rekening atas nama nasabah, sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Forex(disebutkan nomor dan tanggalnya) yang

dibuat oleh dan antara nasabah dengan Perusahaan Sekuritas, yang untuk tindakan mana telah mendapat persetujuan penuh dari isteri/suami (untuk nasabah perorangan) atau Pemberi Kuasa (untuk nasabah Perusahaan/Badan Hukum) dan selanjutnya segala akibat dan resiko yang timbul sebagai akibat dari pembukaan Rekening Efek Marjin menjadi tanggung jawab kami.”

Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Forex merupakan bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek yang dibuat antara Perusahaan Sekuritas dengan Nasabah.

a. Perorangan

1) Data Nasabah

- (a) Nama lengkap Pemegang Rekening;
- (b) Kewarganegaraan;
- (c) Alamat/Tempat Tinggal (sesuai dengan KTP/SIM/Passport);
- (d) Pekerjaan;
- (e) Penghasilan Tahunan : Kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau jumlah lain (sebutkan);
- (f) Jumlah kekayaan : Kurang dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) atau jumlah lain atau jumlah lain (sebutkan);
- (g) Sumber Dana;
- (h) Tujuan Penggunaan Dana;

2) Fasilitas/Nilai Pembiayaan

Jumlah pembiayaan atau jumlah besarnya plafon/fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi trading forex yang diberikan Perusahaan Sekuritas kepada Nasabah dengan nilai maksimum sebesar 50% dari nilai Jaminan.

3) Jangka Waktu

Jangka waktu dimulai pada tanggal Hari Bursa setelah Nasabah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3

Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan akan tetapi dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

- 4) Jaminan : Dalam bentuk uang (disebutkan besarnya), yang ditransfer langsung kepada rekening Perusahaan Sekuritas; Dalam bentuk efek (disebutkan banyaknya);
- 5) Tanggal Pembayaran;
- 6) Suku Bunga atas Fasilitas; Suku bunga yang dikenakan dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan Sekuritas atas penggunaan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Trading Forex.
- 7) Denda; Kewajiban Nasabah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Perusahaan Sekuritas, akibat keterlambatan Nasabah melakukan pembayaran kepada Perusahaan Sekuritas.
- 8) Biaya Transaksi; Merupakan biaya transaksi yang dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang dikenakan dan debebankan atas transaksi jual dan/atau beli yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan Sekuritas.
- 9) Ratio Pembiayaan; Perbandingan antara jumlah total Jaminan dengan Nilai Pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Sekuritas kepada Nasabah, yang pada setiap saat jumlah total Jaminan tersebut tidak boleh kurang.
- 10) Ketentuan Khusus; Disini diatur mengenai Posisi *Margin Call*, yaitu pemberitahuan dari Perusahaan sekuritas kepada Nasabah Ratio

Pembiayaan telah melampaui batas yang telah ditetapkan dan Nasabah diwajibkan untuk melakukan *Top Up* berupa penambahan uang tunai atau efek oleh Nasabah ke dalam Rekening Transaksi forex sehingga Ratio Pembiayaan terpenuhi. Sedangkan Posisi *Cut Loss*, yaitu suatu keadaan bilamana harga efek turun sampai dengan batas tertentu yang berakibat menimbulkan hak Perusahaan Sekuritas untuk menjual efek milik Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.

Dalam hal transaksi trading forex, hal ini tidak terlepas dari konsep dasar perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian adalah satu atau lebih orang yang mengikat diri dan perilaku bersama satu orang atau lebih. Ketentuan perjanjian terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III yang bersifat terbuka artinya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan untuk mengaturnya saja. Transaksi trading forex pada dasarnya sama dengan transaksi umum, yaitu transaksi dilakukan pada saat telah tercapai kesepakatan atas barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau jasa tersebut. Yang membedakan hanya media yang digunakan, jika dalam perdagangan biasa para pihak harus bertemu langsung di satu tempat untuk menyepakati transaksi yang akan dilakukan dan harga jual barang atau jasa. Sedangkan dalam transaksi *trading forex*, media Bursa Efek perlu menjadi media utama dalam proses transaksi, sehingga proses transaksi tidak membutuhkan pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian tentang adanya perjanjian transaksi perdagangan. Dampak

transaksi *trading forex* terhadap perkembangan ekonomi berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah bagian hukum yang tidak diatur dalam peraturan tentang transaksi *trading forex* di Indonesia.

Pengaturan mengenai transaksi trading forex masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian yang terjadi dalam transaksi trading. Perjanjian dalam transaksi Margin Trading terjadi antara kedua belah pihak forex yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara, yang mana disebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam transaksi trading forex terjadi karena adanya kesepakatan, apabila dikaitkan dengan teori dalam perjanjian yang diungkapkan oleh Munir Fuady, maka untuk menentukan kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi dapat digunakan sebagai suatu patokan untuk menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian tertutup sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, teori tersebut yaitu:⁸⁹

1) Teori Penawaran dan Penerimaan (*offer and acceptance*)

Kesepakatan kehendak pada prinsipnya baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak yang kemudian diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Sehingga menurut teori ini kesepakatan antar pihak terjadi

⁸⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 45.

pada saat perusahaan sekuritas mengajukan penawaran kemudian investor yang memilih nilai yang ditawarkan.

2) Teori Pernyataan (*verklarings theorie*)

Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku, karena masyarakat pada umumnya menghendaki bahwa apa yang dinyatakan dapat dipegang. Berdasarkan teori ini, apa yang dinyatakan oleh investor dengan cara mengisi order form maupun form lainnya, maka itulah yang dianggap berlaku, bukan lagi apa yang dikehendakinya. Demikian juga dengan apa yang dinyatakan oleh perusahaan sekuritas yang berkaitan dengan persetujuan proses transaksi trading forex yang berlaku itulah yang berlaku, sehingga suatu kesepakatan kehendak antar para pihak telah terjadi ketika investor melakukan pengisian order form maupun form lainnya, dan perusahaan menyetujuinya transaksi tersebut.

3) Teori Konfirmasi

Teori ini menjelaskan bahwa suatu kata sepakat telah ada atau dianggap telah terjadi ketika pihak yang melakukan penawaran mendapat jawaban atau konfirmasi jawaban dari pihak yang menerima tawaran. Sehingga kata sepakat dalam transaksi Margin Trading terjadi ketika Perusahaan sekuritas mendapat jawaban dari investor atas berita konfirmasi jawaban dari pihak yang melakukan penawaran

termasuk juga informasi yang dikirimkan oleh investor yang telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid.

4) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori yang berusaha untuk menjelaskan jika kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka apa yang dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku.

Namun, teori-teori ini tidak dapat digunakan untuk menentukan kapan harus menandatangani perjanjian transaksi trading forex. Karena tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian perjanjian investor menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas. Dalam transaksi trading forex perjanjian yang terjadi diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, sehingga yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam KUHPerdara harus diperhatikan sesuai aturan yang berlaku dan secara umum menggunakan KUHPerdara dapat diperhatikan dan diterapkan.

Perjanjian yang terjadi dalam transaksi trading forex dapat dikenakan Pasal 1313 KUHPerdara sebagai pengaturannya, sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUH Perdata harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdara dapat diterapkan serta perjanjian dalam transaksi Trading forex dapat diakui keabsahannya, Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat

dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPdata yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPdata, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga.

Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Kontrak yang terjadi dalam Transaksi trading forex merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara perusahaan sekuritas dengan investor, sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam Transaksi Trading forex.

Namun demikian teori teori tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan kapan kesepakatan perjanjian transaksi trading forex. Karena tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya. Kesepakatan perjanjian investor menyepakati terhadap syarat dan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas.

Dalam transaksi trading forex perjanjian yang terjadi diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata, sehingga yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam KUHPdata harus diperhatikan sesuai aturan yang

berlaku dan secara umum menggunakan KUHPerdara dapat diperhatikan dan diterapkan.

Perjanjian transaksi *trading forex* dapat diakui keabsahannya, dimana syarat syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

a. Sepakat Mereka yang Mengingatkan Dirinya

Ini syarat pertama, kemudian semua kesepakatan harus merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada paksaan, kesalahan dan kecurangan. (Dwang, dwaling, bedroh). Kesepakatan pada dasarnya adalah pertemuan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tentang isi perjanjian.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kesepakatan dalam transaksi trading forex dihasilkan karena adanya kesadaran saling mengikat antara kedua pihak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 "Perjanjian Pembiayaan Transaksi Efek", investor menyetujui dan menyetujui perjanjian perusahaan efek. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan syarat dan ketentuan serta kewajiban pemodal kepada perusahaan sekuritas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dicapai perjanjian transaksi trading forex antara kedua belah pihak, sehingga kesepakatan tersebut dapat direalisasikan. Itu dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

Untuk membuat suatu perjanjian diperlukan pemenuhan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian, salah satu syarat tersebut adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap untuk membuat perikatan, dimana hal ini disebutkan dalam Pasal 1329 KUHPerdata yaitu: *“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”*.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, persyaratan bagi seseorang yang belum dewasa adalah di bawah usia 21 tahun dan belum menikah atau belum menikah. Namun, setiap orang dewasa belum tentu sehat. Sehingga perlu juga dilihat syarat kedua “mereka yang ditaruh dibawah pengampuan” berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus dibawah pengampuan, begitu juga jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

c. Suatu hal tertentu

Hal tersebut berkaitan dengan tujuan perjanjian, artinya tujuan perjanjian harus jelas, jenis dan jumlah yang dapat ditentukan dan dihitung, undang-undang mengizinkan dan para pihak dapat melakukannya. Meskipun berbeda dengan transaksi konvensional, namun transaksi trading forex mengandalkan bentuk berwujud yang dapat disentuh. Transaksi trading forex tidak ada bentuknya dan tidak

akan disentuh, tetapi ada distribusi fisik dan ada lokasi transaksi yaitu ada pada dasarnya tidak terlalu banyak Perbedaan besar.

Transaksi transaksi trading forex ini juga akan terjadi, namun produk yang akan diperdagangkan sebenarnya tidak muncul, melainkan hanya berupa nilai keuntungan dari transaksi saham tersebut, oleh karena itu untuk memastikan keabsahan perjanjian atau kontrak yang dihasilkan oleh transaksi valuta asing, harus memenuhi Hukum Perdata "Kondisi tertentu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Hal tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 jo angka 6 Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek, yang mengatur tentang “obyek” transaksi dalam perjanjian yaitu berupa Nilai Keuntungan Bersih dan Fasilitas atau Nilai Pembiayaan. Pasal 1333 juga menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. *“Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”*. Sehingga apa yang diperjanjikan harus mempunyai barang beserta jumlah maupun jenisnya sebagai pokok dari perjanjian yang telah dibuat.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi tersebut maka, suatu kontrak transaksi Margin Trading haruslah menyebutkan mengenai obyek dari kontrak tersebut baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka di dalam transaksi trading forex juga ada suatu hal tertentu yang menjadi obyek dalam perjanjian atau kontrak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 jo 1333 KUHPerdata terhadap perjanjian pada umumnya.

d. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: *“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”* Sehingga suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Kemudian ditambahkan dalam Pasal 1336 KUHPerdata yang berbunyi: *“jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan persetujuan namun demikian adalah sah”*.

Adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta sanksinya yang disebutkan oleh perusahaan sekuritas memberikan pengertian bahwa kontrak yang

terjadi dalam transaksi *Margin Trading* secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian. Selain hal tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek mengatur bahwa investor membebaskan Perusahaan Sekuritas dari tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul atas dilaksanakannya Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek. Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum

antara subyek hukum dimana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata, adanya suatu perikatan adalah lahir karena suatu perjanjian atau karena suatu undang-undang.

Permasalahan yang dihadapi dalam transaksi trading forex ini adalah pada saat perusahaan melikuidasi aset investor untuk memenuhi kewajibannya, investor dapat melakukan transaksi dengan perusahaan sekuritas. Investor biasanya tidak menyadari bahwa surat berharga dan uang yang ada di rekening merupakan jaminan atas alat perdagangan yang disediakan. Di sisi lain, perusahaan efek yang memberikan kemudahan bertransaksi kepada investornya tidak menandatangani perjanjian yang diperlukan untuk bertransaksi. Perusahaan sekuritas biasanya menggunakan mekanisme perjanjian untuk memudahkan

investor. Ketika default terjadi, investor akan mempertanyakan masalah ini.

Masalah lain yang akan muncul adalah kelalaian perusahaan efek untuk menginformasikan investor seluk beluk transaksi trading forex ini. Padahal, hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan efek untuk memahami latar belakang, mekanisme perjanjian yang benar, situasi keuangan dan tujuan investasi yang harus dilaksanakan investor. Walaupun investor mengetahui kewajiban ini, mereka harus memenuhinya dan memiliki hubungan jangka panjang dengan perusahaan sekuritas. Kegagalan menjelaskan situasi yang akan dihadapi investor dalam transaksi trading forex menjadi alasan mengapa investor mempertanyakan apakah terdapat ketidaksesuaian antar perusahaan sekuritas. Di sisi lain, ada juga kasus dimana perusahaan sekuritas membeli saham yang tidak boleh diperdagangkan dengan margin. Ini telah menjadi permainan karena spekulasi dan manipulasi yang tinggi terhadap saham tersebut. Dengan demikian, risiko investor dan perusahaan efek akan meningkat.

Hukum perdata Indonesia saat ini mengakui adanya kebebasan kontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menetapkan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara hukum adalah sah sebagai hukum kontrak. Mereka yang membuatnya. Perjanjian transaksi trading forex merupakan hasil kesepakatan antara para pihak yang terlibat, padahal kontrak tersebut

sebenarnya bukan merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, melainkan merupakan bentuk kontrak yang dapat digolongkan sebagai kontrak standar. Ada kontrak, satu pihak membuat proposal ke pihak lain, dan kemudian pihak lain hanya menyetujui kontrak tersebut. Oleh karena itu, menetapkan prinsip kesukarelaan sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Indonesia dapat memperkuat prinsip kebebasan kontrak.

B. Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Trading Forex

Transaksi Trading Forex dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak antara perusahaan sekuritas dengan Nasabah/investor yang salah satu isinya adalah hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk dari perlindungan hukum.

Perlindungan hukum investor oleh perusahaan berjangka dalam transaksi valuta asing belum sepenuhnya terealisasi atau belum memenuhi harapan. Ini didasarkan pada ketidakmampuan untuk melaksanakan pengaturan yang benar dan benar serta pelaksanaan perdagangan berjangka. Situasinya masih ada perusahaan pialang ilegal yang beroperasi, dan pelaksanaan perjanjian kontrak dan transaksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga tidak berdasarkan otorisasi. Para pialang berjangka seringkali melakukan pelanggaran kontrak (wanprestasi) bahkan kejahatan (Market Crime) yang setidaknya sering membayangi aktivitas perdagangan berjangka. Berdasarkan indikator-indikator di atas, pada

dasarnya hal ini menjadi kendala bagi terwujudnya perlindungan hukum bagi kepentingan investor.

Dalam perdagangan trading forex dapat mendatangkan keuntungan bagi investor, begitu pula sebaliknya dapat merugikan investor. Kelemahan dan kelemahan transaksi trading forex terkait masalah pembuktian ketika disidangkan ke pengadilan. Jika ada default antara perusahaan berjangka dan investor dalam perjanjian, maka masalah akan muncul. Pemecahan masalah selalu terkait dengan bukti yang sedang diproses.

Dalam KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata terdapat alat bukti tertulis, alat bukti saksi, dakwaan, pengakuan dan sumpah. Pasal 1867 "Hukum Pidana" menetapkan bahwa pembuktian harus dilakukan dalam bentuk benar atau tulisan tangan, dan makna tertulis dalam pasal ini dikonfirmasi di atas kertas dalam bentuk tertulis.

Perlindungan investor selalu berkaitan dengan perlindungan konsumen jadi perlu diperhatikan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan transaksi yang terjadi pada investor. Jadi perusahaan berjangka sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian investor, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum terhadap investor oleh pialang berjangka berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka

Komoditi yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) serta ketentuan dalam penyelenggaraan terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Praktiknya dalam pelaksanaannya oleh Perusahaan Berjangka.

Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 5 tentang Pengaturan dan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dilakukan dengan tujuan:

- a. mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
- c. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Salah satu kelebihan dalam berinvestasi dalam perdagangan Berjangka khususnya forex dengan badan pengawas dari pemerintah. Didalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pemerintah indonesia menetapkan bahwa Badan Pengawas perdagangan berjangka merupakan unit kerja yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada menteri perdagangan, yang bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Untuk mencapai tujuannya sebagai Badan Pengawas, BAPPEBTI diberi kewenangan yang cukup luas. Pada dasarnya kewenangan itu diarahkan untuk menjamin terwujudnya integritas pasar, integritas keuangan, dan perlindungan bagi investor nasabah. Salah satu kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan perijinan dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

Di Indonesia, badan usaha pertama yang menjadi penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka adalah BBJ atau *Jakarta Futures Exchange* (JFEX). Lembaga kliring berjangka atau biasa disebut lembaga kliring adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang harus ada dalam sistem perdagangan berjangka. Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka dan merupakan institusi tersendiri. Lembaga kliring berfungsi menyelesaikan dan menjamin kinerja semua transaksi yang dilakukan di bursa berjangka dan telah didaftarkan. Lembaga kliring akan bertindak sebagai penjual terhadap investor yang memiliki posisi beli yang masih terbuka belum dilikuidasi. Sebaliknya, juga sebagai pembeli terhadap investor yang memiliki posisi jual yang terbuka. Lembaga kliring juga

sebagai penjamin atas dana nasabah khususnya bila terjadi kepailitan pada pialang berjangka, dimana investor menyetor dananya sebagai modal.

Banyaknya penipuan pada perusahaan pialang berjangka yang ilegal mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pialang dalam bertransaksi forex khususnya. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian kurang mampu untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat. Bahwa perusahaan pialang yang ilegal pun belum dapat memberikan jaminan. Predikat legalitas perusahaan pialang yang sudah memiliki kepastian hukum (legal) dapat berubah sewaktu-waktu secara mendadak baik karena faktor internal maupun faktor eksternal tanpa sepengetahuan nasabah. Karena jaminan perlindungan bagi nasabah / investor sangat diperlukan. Maksudnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dikemudian hari bilamana perusahaan pialang berjangka mengalami pencabutan izin usahanya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

1) Bursa Berjangka wajib:

- a. memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangka dengan baik;
- b. Menyiapkan catatan dan laporan secara terperinci seluruh kegiatan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, Kontrak Derivatf lainnya dan penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya tersebut.
- c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- d. Membentuk Dana Kompensasi;
- e. Mempunyai satuan pemeriksa;

- f. Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka;
 - g. Menyebarluaskan informasi harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan;
 - h. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. Dan
 - i. Mengawasi transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
- 2) Pimpinan satuan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Berjangka, dan Bappebti tentang masalah materiil yang ditemukan, yang dapat mempengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangka yang bersangkutan.
 - 3) Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bappebti.
 - 4) Sebelum diberlakukan, peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c termasuk perubahannya, wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Pasal 18

Bursa Berjangka berwenang:

- a. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Bursa Berjangka;
- b. mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian, bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka;
- c. menetapkan persyaratan keuangan minimum dari pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka;
- d. melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- e. menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
- f. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga;
- g. menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka ;
- h. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme transaksi Kontrak Berjangka dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti; dan

- i. memperoleh informasi yang diperlukan dari Lembaga Kliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Kliring Berjangka.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yang disebutkan hanya peraturan teknis tentang perilaku pialang berjangka, yang pada dasarnya tidak dapat sepenuhnya memuaskan kepentingan investor. Ketentuan tersebut hanya digunakan dalam praktek perdagangan berjangka, khususnya perdagangan valuta asing, sebagai peraturan formal dan bentuk pemberian perlindungan hukum bagi kepentingan investor. Hanya penyimpangan dari regulasi yang ada yang masih akan merugikan investor.

Berdasarkan contoh kasus yang dialami oleh Bapak Ruslani⁹⁰ pertama tawaran investasi dengan iming iming hasil tinggi, Perusahaan itu menawarkan paket investasi forex dengan imbal hasil mulai 10% hingga 40% dalam sebulan. Dengan perjanjian elektronik Bapak Ruslani menyetorkan dana untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut sebesar US\$10000,- (Sepuluh ribu Dolar Amerika). Dengan Penempatan Dana ke perusahaan dulu yang mengalihkan dana investor ke trading forex. Jadi Bapak Ruslani Hanya menunggu modal ditambah *profit* dalam satu bulan. Dalam bulan pertama perusahaan berjangka sesuai dengan perjanjiannya profit sebesar 10% dari modal awal. Satu bulan ke depannya perusahaan itu tidak memenuhi perjanjiannya. mengalami kerugian transaksi yang diakibatkan oleh perusahaan berjangka tempat bapak ruslani berinvestasi bukan atas berdasarkan amanat yang diberikan oleh keduanya.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Ruslani selaku Investor. Pada Hari Kamis, tanggal 10 September 2020, Pukul 17.00 WIB. Di Rumah Bapak Ruslani, Tegal.

Dalam kasus serupa, Ibu Minda dan teman-temannya bertindak sebagai investor, sebagai jurnalis, ia telah menginvestasikan 4 miliar rupiah (4 miliar rupiah) melalui perusahaan berjangka di bursa berjangka. Mengenai pelanggaran terkait pengaduan tersebut, hal tersebut berdasarkan kesepakatan kontrak yang dicapai dengan perwakilan pialang perusahaan berjangka. Ketika investor mengajukan transaksi ke perwakilan broker saat melakukan transaksi, perwakilan broker harus menginformasikan pasar terlebih dahulu ketika transaksi akan diperdagangkan terlebih dahulu. Faktanya, perwakilan broker biasanya berdagang terlebih dahulu dan kemudian melaporkan, dan kemudian pada perdagangan terakhir, investor berakhir dengan kerugian besar.

Pak Rudy juga pernah mengalami kasus serupa⁹¹, dia menginvestasikan US \$ 25.000 (US \$ 25.000) atau setara dengan Rp. 250.000.000 (250 juta dong). Soal pelanggaran kontrak, pengaduannya tentang kontrak yang ditandatangani dengan perwakilan pialang perusahaan pialang berjangka, Investor berharap setiap transaksi yang dilakukannya harus mendapat persetujuan dari Pak Rudy. Pelaksanaan lima transaksi yang dieksekusi hanya dilaporkan sebanyak dua kali, dan dari dua transaksi yang dilaporkan tersebut, salah satunya mengalami kerugian. Berdasarkan kerugian tersebut, perusahaan berjangka tidak melakukan langkah penyelamatan atau prosedur manajemen risiko. Atas kerugian yang terus membengkak tanpa sepengetahuan Pak Rudy, sebenarnya dilakukan

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Hendra selaku Kuasa Hukum Investor.

perusahaan berjangka yang tentunya bertentangan dengan prinsip prosedur manajemen risiko.

Perusahaan Berjangka tempat mereka berinvestasi ialah adanya pelanggaran terhadap Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang juga diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi: *Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Investor yang bersangkutan.* Berdasarkan isi Pasal diatas jelas terbukti bahwa pialang berjangka telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 52 ayat (1) yang merugikan investor sebagaimana yang dialami oleh Bapak Ruslani dan Ibu Minda.

Dalam praktek Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Perdagangan Efek, perlindungan terhadap status perusahaan berjangka saat ini telah dilindungi sepenuhnya, tetapi belum dilindungi secara formal. Sebab, meski sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, status hukum “Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek” yang dicapai secara tertulis hanya tidak memenuhi persyaratan formal. Berlaku secara hukum untuk

kesepakatan para pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Namun, meskipun tidak memenuhi formalitas tersebut, bukan berarti Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (termasuk pemberian jaminan) telah dibatalkan, melainkan sebagai kesepakatan umum (perusahaan berjangka) yang tidak memberikan prioritas dan penegakan kepada kreditur. hak.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya penegasan hubungan antara Perusahaan Berjangka dengan Investor dalam arti hubungan tersebut tidak hanya tertuang dalam suatu formulir saja tetapi harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris, termasuk pemberian jaminan oleh Nasabah/Investor, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak maupun kepada pihak ketiga mengenai adanya hubungan hukum antara Perusahaan Berjangka dengan Investor. Terhadap pelanggaran (wanprestasi) dapat ditempuh upaya penyelesaian hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Adapun upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan cara:

1. Penyelesaian secara Perdata

Penyelesaian secara perdata merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa dianjurkan oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal

61 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi: Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau;
- b. pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.

Pembayaran ganti rugi dengan memakai dana kompensasi hanya akan diberikan dengan persentasi tertentu dari kerugian yang ada dan bukan diganti sepenuhnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Ganti Rugi dibayarkan dalam persentase tertentu dari Dana Kompensasi yang tersedia diBursa Berjangka, sesuai dengan peraturan Bursa Berjangka. Pembatasan ini diperlukan agar Dana Kompensasi selalu tersedia diBursa Berjangka.

Berdasarkan hasil pengamatan, apabila dalam kontrak transaksi *trading forex* terjadi suatu wanprestasi atau pelanggaran maka dilakukan penyelesaian sebagai berikut :

a. Melalui Perusahaan Berjangka

Dalam setiap perusahaan berjangka berkewajiban untuk menyediakan divisi kepatuhan (*compliance*) yang wajib melakukan penanganan pengaduan investor untuk pertama kalinya. Maka investor yang merasa di rugikan melalui badan penyelesaian yang ada di perusahaan berjangka. Sebagai contoh kasus yang di alami Bapak Ruslani mengadukan permasalahan tersebut kepada perusahaan berjangka. Dengan adanya laporan tersebut pihak perusahaan berjangka menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam perjanjian investasi yang disepakati melalui musyawarah yang dilakukan oleh divisi kepatuhan dari perusahaan berjangka.

Berdasarkan musyawarah tersebut bahwa perusahaan berjangka menyatakan bahwa tidak akan mengganti kerugian yang terjadi. Karena investor telah memberikan amanat kepada perusahaan berjangka untuk melakukan transaksi. Dari pihak perusahaan berjangka bahwa telah memberikan informasi terhadap setiap transaksinya tidak ada komplain atau keberatan dari investor. Terhadap pernyataan dari perusahaan berjangka Bapak Ruslani membantahnya, karena untuk setiap transaksinya mengalami kerugian

cukup besar, perusahaan berjangka tidak memberikan informasi “pasar” sebagaimana terlebih dahulu. Perusahaan berjangka tidak mau menerima alasan dari investor tersebut, sesuai dengan prosedur penyelesaian tahapan selanjutnya dengan mengajukan penyelesaian ke bursa berjangka.

b. Melalui Bursa Berjangka

Bapak Ruslani bisa membuktikan adanya kesalahan atau pelanggaran dari perusahaan berjangka yang mengelolanya. Permasalahan pengembalian dana tersebut dapat dilakukan oleh bursa berjangka yaitu dengan memakai dana kompensasi yang ada di bursa berjangka.

Dalam kasus yang menimpa Bapak Ruslani, apabila pada Pasal 1 Angka 23 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan bahwa dana kompensasi digunakan oleh bursa berjangka, yang timbul akibat cidera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan berjangka. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal yang sama diterangkan bahwa cidera janji atau kesalahan perusahaan berjangka antara lain, tindakan yang menyesatkan, penyalahgunaan kepercayaan, kelalaian dan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan berjangka sehingga mengakibatkan kerugian investor.

Dana Kompensansi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 23 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai pialang berjangka. dalam kedudukannya sebagai perusahaan berjangka. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan bahwa Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Perusahaan Berjangka untuk Dana Kompensasi.

Dalam Pasal 45 Ayat (1) tujuannya yaitu Penyediaan Dana Kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap investor dari perbuatan perusahaan berjangka yang tidak bertanggung jawab. Pembayaran ganti rugi dengan memakai dana kompensasi hanya akan diberikan dari kerugian yang ada bukan diganti sepenuhnya. Sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan Berjangka Komoditi yaitu dengan ganti rugi dibayarkan dalam presentase tertentu dari dana kompensasi yang tersedia di Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan Bursa Berjangka. Pembatasan ini diperlukan agar dana kompensasi selalu tersedia di Bursa Berjangka.

c. Melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) biasanya dilakukan melalui sistem mediasi. Mediasi tersebut guna menampung aspirasi investor yang mengajukan kasusnya yang menginginkan pengembalian dana melalui penyelesaian sengketa secara cepat. Penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan penyelesaian terakhir secara perdata melalui badan badan yang ada di internal Bursa Berjangka dan Perdagangan Berjangka Komoditi. Jika pada tahap ini investor belum menemukan kepuasan terhadap penyelesaian yang ada maka penyelesaian berikutnya ke tahap melalui Badan Arbitrase atau Lembaga Peradilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian, terhadap perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading forex* maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme perjanjian transaksi *trading forex* yaitu perjanjian yang dituangkan setiap transaksi *trading forex* dalam bentuk formulir yang wajib diisi oleh investor . Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan berjangka dengan investor dapat terjadi. Transaksi *trading forex* pada dasarnya sama dengan perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa tersebut. Perbedaanya media yang digunakan. Jika perdagangan konvensional dengan bertemu langsung dan menyepakati apa yang akan diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam transaksi *trading forex* proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media bursa efek sebagai media utamanya. Sedangkan tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara pihak apa yang akan di transaksikan perdagangan *forex*.

2. Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi trading forex diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tetapi hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa tidak menyebutkan lebih lanjut tentang upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan dalam perusahaan berjangka. Penyelesaian sengketa investor dengan perusahaan berjangka hanya dilakukan dengan penyelesaian secara perdata.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dari penelitian terhadap perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi trading forex, saran sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Berjangka
 - (a) Perusahaan berjangka dalam melakukan transaksi dengan investor seharusnya berpedoman pada peraturan perundang undangan serta berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Untuk melindungi kepentingan investor dan menghindari adanya sengketa antara perusahaan berjangka dengan investor.
 - (b) Dalam perjanjian investor dengan perusahaan berjangka perlu adanya pengatur hubungan dalam arti hubungan tersebut tidak hanya tertuang dalam satu formulir tetapi harus ada dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, yaitu Notaris.

Sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak.

2. Bagi Investor

- (a) Sebelum melakukan transaksi sebaiknya investor harus memahami perjanjiannya, cara berkerjanya. Atau meminta informasi pada perusahaan efek yang memiliki bagian riset yang telah berpengalaman.
- (b) Investor harus memahami bahwa dalam transaksi trading forex memiliki risiko yang tinggi. Transaksi trading forex keuntungan jangka pendek dan keuntungan seseorang adalah kerugian bagi orang lain.
- (c) Perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian sia sia hanya bersifat legalitas dengan kewenangan terbatas. Olrh karena itu perlu adanya peran aktif berbagai pihak terkait, seperti Kementrian Perdagangan, Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Bursa berjangka, BAPPEBTI dan Kliring Berjangka. Agar trading forex tidak menjadi sarana investasi semu, dan hanya sebagai tempat legalisasi praktik penipuan, serta tidak menjadi kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adonara,F Firman. *Aspek Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*,Jakarta : Gunung Agung, 2002.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Bambang, R.Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Boediono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Cst.Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata, 2009.
- Dianata, Eka Putra, *Berburu Uang di Pasar Modal*. Jakarta: Effhar dan Dahara,2002.
- Dandytra, Muhammad Maky. *Ilmu Trading Untuk Saham, Forex, Komoditi, dan Index*. Jakarta: Evolitera, 2010.
- Fuady, Munir. *Hukum Perjanjian Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hariyani, Iswi.” *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Jorgianto, Hartono. *Teori Filosofis dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: BPFE, 2015.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Lucius M. Sitanggang, *Psycho On Trading*, Yogyakarta: Andi Offshet, 2007.
- Ming,The Fei. *Day Valuta Asing*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- Naja, R Daeng. *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University, 2019.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Marbun, B.N. *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Swara, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ming, The Fei. *Day Valuta Asing*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mujadi, Kartini. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari, Memahami, Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010.
- Rumokoy, Donald Albert. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Salim HS. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salim, Joko. *Tanya Jawab Forex*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009.
- Suharto, Frento T. *Investasi Secara Benar Mengungkap Rahasia Forex*. Jakarta: .Elex Media Komputindo, 2013.
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2016.

JURNAL

- Dian Husna Fadla, Yunanto. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan ininvestasi fiktif*. Jurnal ilmu hukum, volume 11, nomor 2, Tahun 2015, Hal 207.

Wardhani, Indah Kusuma “Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Forex Trading menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”(Studi kasus di PT. Finex Berjangka) **Jurnal Ilmu Hukum**, Volume III, Nomor 1, Tahun 2016. hlm 445.

Titin, *Analisis Pengambilan Keputusan dalam Transaksi Trading Forex di Exindo Regional Lamongan*, **Jurnal Ilmu Hukum**, Volume 17, Nomor 2 Tahun 2015, hlm 692.

SKRIPSI

Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Foreign Exchange Trading pada Perusahaan Pialang Berjangka ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”. Skripsi Sarjana Hukum, Jember : Fakultas Hukum Jember, Tahun 2013, t.d.

Martha Noviditya, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan” , Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, t.d.

Nailly Surroya, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka oleh Perusahaan Pialang Berjangka”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, t.d.

Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”, Tesis , Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, t.d.

WEBSITE

<http://fxkeybizz.blogspot.com/2009/08/mekanisme-dan-legalitasforex.html?m=1>,
<http://cariuang.purwochanger.com/sejarah-mata-uang-dan-pertukaran-valuta-asing.htm>, <http://www.dudung.net/>.

<http://pustaka.uns.ac.id/?menu=news&option=detail&nid=127>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dhipta Abdul Muiz
NPM : 5117500163
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 19 Oktober 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan KH. Syarif No.14 Desa Bojongsana
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal
Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SDN Negeri Bojongsana	2004	2010
2	SMP Negeri 8 Kota Tegal	2010	2013
3	SMA Negeri 1 Kramat	2013	2016
4	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2017	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Januari 2021

Hormat saya,

(Dhipta Abdul Muiz)